



Penundaan Pencairan Hibah Ancam Kegiatan Lembaga Adat

MANGUPURA, NusaBali

Penghentian pencairan dana bansos/hibah mengancam keberlangsungan kegiatan lembaga adat. Pasalnya selama ini seluruh kegiatan adat sebagian besar bersumber dari dana hibah. Karena itu, DPRD Badung meminta agar pemerintah mengkaji ulang, karena dinilai masih ada kemungkinan bantuan dicarikan.

Alasan legislatif merujuk pasal 298 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa. Menurut Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta yang juga koordinator bidang anggaran, pengertian dapat diberikan kepada pada pasal 298 (5) secara arifiah, mengandung makna sebagai suatu ruang kesempatan untuk mendapatkan hibah, bukan membatasi atau melarang. "Intinya disitu bukan membatasi atau melarang," jelasnya, Kamis (3/9) kemarin.

Kemudian, pengertian badan, lembaga dan ormas (organisasi masyarakat) yang berbadan hukum Indonesia, menurut Sunarta cenderung bersifat multitafsir. "Apakah bermakna sebagian atau seluruhnya berbadan hukum Indonesia," ucap Sunarta.

Karena beberapa alasan itu, Sunarta yang juga Bendesa Adat

Abianbase, Kelurahan Kapal, Mengwi, mengharapkan ketentuan pasal 298 UU 23 perlu ditelaah secara mendalam.

Lebih lanjut dikatakan, dengan tersendatnya pencairan dana hibah masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Hal itu lantaran hampir sebagian kegiatan di desa adat bersumber dari dana hibah yang diberikan pemerintah. "Banyak kegiatan pembangunan di desa adat terancam terhenti, karena sebagian besar dananya dari bantuan hibah," ungkap Sunarta.

Implikasi lainnya, sebut Sunarta, tentu pada kondisi APBD, mengingat akibat terparkirnya dana hibah yang sebesar Rp 251 miliar, penyerapan anggaran akan menjadi bermasalah, yang menyebabkan SILPA akan menjadi sangat tinggi. "Bagaimana kemudian dengan dana hibah yang sudah sempat dicairkan. Pemprov dan pemerintah pusat perlu juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat," harapnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Sentana. Sebagai wakil rakyat yang juga memfasilitasi dana hibah untuk masyarakat, lahirnya aturan tersebut sebagai

upaya pusat mengintervensi kebijakan di daerah. Apalagi dalam UU No. 32 tahun 2004 jelas ditegaskan kewenangan pemerintah didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah.

Menurutnya, jika pemerintah pusat mencurigai adanya penyelewengan dana hibah oleh oknum wakil rakyat sangat tidak masuk akal. Sentana tegas mengatakan, kalau oknum DPR yang bermasalah, tangkap oknumnya. Sebab, DPR tahu persis keadaan di bawah, jadi pasti tepat sasaran. "Kalaupun ada yang salah sasaran itu hanya oknum semata," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Badung, I Nyoman Harry Yudha Saka, mengakui belum ada solusi terkait pencairan dana hibah dan bansos. Pembahasan yang dilakukan, kata Harry Yudha, masih belum menemukan jalan keluar. Seperti diketahui, dalam APBD Induk 2015 hibah dipasang Rp 265,4 miliar. Untuk lembaga atau organisasi sebesar Rp 145,2 miliar. Nah, khusus bantuan hibah kelompok masyarakat dianggarkan Rp 120,2 miliar. **as**

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 2



Ribut Masalah Proyek Kanalisasi Tukad Mati di Badung Anggota Dewan-Kadishut 'Berantem'

Anggota
Komisi
I DPRD
Bali IGK
Kresna
Budi
(kanan)
dan Kadis
Kehuta-
nan Bali,
Gege
Nyoman
Wiranata,
Kamis
(3/9).



• NUSABALI/SUKANTA

DENPASAR, NusaBali
Anggota Komisi I DPRD
Bali dari Fraksi Golkar, Ida
Gede Komang Kresna Budi,
terlibat perang mulut dengan
Kepala Dinas (Kadis) Kehu-
tanán Provinsi Bali, I Gede
Nyoman Wiranata, Kamis
(3/9) siang. Ketegangan saat
pertemuan di Ruang Transi-
t DPRD Bali, Niti Mandala
Denpasar, ini dipicu ribut-

ribut masalah proyek *long
storage* muara Tukad Mati
di Desa/Kecamatan Kuta,
Badung.

Kisahnya, Kamis siang
sekitar pukul 12.30 Wita,
Gede Nyoman Wiranata se-
laku Kadis Kehutanan Provin-
si Bali memang dipanggil
Komisi I DPRD Bali, untuk
membahas masalah proyek
long storage muara Tukad

Mati yang diprotes warga dari
Banjar Jaba Jero, Desa Kuta.
Ida Gede Komang Kresna
Budi selaku anggota Komisi
I secara khusus mengundang
Wiranata ke Gedung Dewan,
untuk minta penjelasan men-
genai proyek di Tukad Mati
yang dihentikan Dinas Ke-
hutanan.

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 7



Anggota Dewan-Kadishut 'Berantem'

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Pemanggilan itu dilakukan Kresna Budi, untuk menindaklanjuti hasil sidak sehari sebelumnya, Selasa (2/9), ke lokasi proyek kanalisasi yang dilaksanakan Pemkab Badung itu. Dalam pertemuan kemarin, Wiranata didampingi salah satu staf dari Dinas Kehutanan Provinsi, sementara Kresna Budi sendiri. Wiranata menjelaskan proses penyetopan proyek kanalisasi Tukad Mati terpaksa dilakukan, lantaran masih ada masalah dengan perizinan dan kerjasama Kementerian Kehutanan.

Kresna Budi pun menyarankan Wiranata supaya mencari jalan tengah terkait keluhan warga di Banjar Jaba Jero, Desa/Kecamatan Kuta yang merasakan dampaknya kalau proyek dihentikan. Anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Golkar Dapil Buleleng ini menyarankan supaya proyek tetap jalan, sambil proses perizinan dan kerjasama dilaksanakan Pemprov Bali-Kementerian Kehutanan dengan Pemkab Badung.

"Supaya tidak ada gejala, proses izin jalan terus, pengerjaan proyek di muara Tukad Mati juga saya minta bisa jalan terus. Jadi, jalan tengah-lah," saran Kresna Budi. Disarankan seperti itu, Wiranata berjanji akan tampung apa yang diminta Kresna Budi. Berapa lama waktunya,

Wiranata mengaku tak mau berasumsi, karena proses perizinan masalah teknis di Kementerian Kehutanan.

Nah, jawaban inilah yang memicu ketidakpuasan Kresna Budi. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Bali langsung meminta Wiranata supaya tidak kaku. "Jangan begitu. Saya ini tersinggung kalau Bapak hanya bilang tampung-tampung saja. Bukan begitu caranya. Bapak jangan bikin emosi. Itu bukan jawaban," sergah Kresna Budi dengan nada tinggi.

Ternyata, Wiranata tidak mau kalah. Birokrat asal Desa Tangguntiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini malah ngotot. "Saya juga bisa emosi. Maunya Bapak apa? Kalau kami, tetap menunggu Kementerian Kehutanan. Sebab, masalah teknis itu ada di kehutanan," jawab Wiranata.

Jawaban Wiranata ini membuat Kresna Budi semakin geram. Sembari menuding Wiranata, Kresna Budi meminta supaya ada sikap jelas soal batas waktu kelarnya izin dan kerjasama di Kementerian Kehutanan. "Bapak niki sampun lingsir (Bapak sudah sudah tua), saya yang muda menghormati Bapak. Tapi, jangan ngomong tampung-tampung. Harusnya, saran kami dikoordinasikan. Jalan tengahnya, pengerjaan proyek kanalisasi muara Tukad Mati jalan terus, izinnya pun diproses. Kan ha-

rusnya itu solusinya? Jangan tampung-tampung dengan nada ketus," ujar politisi Golkar asal Desa Liligundi, Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng ini.

Situasi mulai mereda, setelah Wiranata selaku Kadis Kehutanan Provinsi Bali berjanji akan menyampaikan saran Kresna Budi. "Ya, tadi itu penyampaian saya begitu. Mungkin nadanya penyampaian begitu, tapi sebenarnya tak ada maksud apa-apa," kilah Wiranata.

Sementara itu, sesuai pertemuan kemarin siang, Kresna Budi mengaku kecewa dengan sikap Wiranata. "Pejabat kayak begini harusnya dievaluasi Gubernur Bali. Saran kita dari Dewan dijawab dengan nadatinggi dan hanya ditampung. Kita akan tunggu dan kawal masalah ini," katanya.

"Nggak boleh hanya tampung-tampung saja. Harus dilaksanakan jalan tengah. Saran kami ke Gubernur nanti, proyek jalan terus, proses izin tetap berjalan. Kan sebelumnya Pemkab Badung sudah menyampaikan masalah proyek kanalisasi muara Tukad Mati itu ke Kementerian Kehutanan. Saya tahu itu datanya," lanjut Kresna Budi yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Kadis Kehutanan Provinsi Bali Gede Nyo-

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 15



man Wiranata mengatakan ketegangan dengan Kresna Budi kemarin siang mungkin disebabkan karena baru pertama kali ketemu. "Kita baru pertama kali ketemu. Caranya penyampaian beda, tapi sebenarnya kita tadi sudah satu tujuan," tandas Wiranata.

Soal proyek kanalisasi muara Tukad Mati di Kuta, menurut Wiranata, pihaknya sudah bertemu Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dalam pertemuan yang digelar di Badung, Kamis kemarin, Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka juga hadir.

dari pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem itu, disepakati 5 poin keputusan. Pertama, Pemkab Badung segera mengajukan usulan perubahan blok ke Gubernur. Kedua, Dinas Kehutanan Provinsi Bali segera melakukan perubahan dengan membentuk tim.

Ketiga, hasil perubahan segera diajukan Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk penyesuaian di Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Keempat, akan dibuatkan perjanjian kerjasama antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung sebagai bentuk izin melaksanakan kegiatan sesuai dengan Permenhut Nomor 5 Tahun 2011. Kelima, sebelum proses tersebut selesai, kegiatan proyek dihentikan. **nat**

Edisi : Jumat, 4 sept 2015

Hal : 1